

**DAFTAR INFORMASI YANG DI KECUALIKAN
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023**

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1	Dokumen penawaran kontrak pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan persaingan tidak sehat antar penyedia	Menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian
		Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa				
2	Rincian harga perkiraan sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 66	Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif	Penetapan nilai pengadaan yang akurat
		Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa				
3	Kode akses /password aplikasi elektronik	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 34	Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun	Selama password/kode berlaku	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Keamanan data terjaga dengan baik sehingga tidak dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab
4	SPJ, SPM, SPP, SP2D, DPA	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun	Masa berlaku pekerjaan	Mengungkapkan data keuangan intern OPD	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan

NO	URAIAN INFORMASI	URAIAN HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
5	Penetapan kinerja pegawai	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun	Selama periode	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan data pegawai
6	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkapkan rahasia pribadi (data pegawai)	Pasal 17 H angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun	Selama menjadi pegawai dan apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Data pribadi pegawai dapat disalahgunakan	Melindungi data pribadi pegawai
7	Surat-surat yang bersifat sangat rahasia (SR), rahasia (R), dan konfidensial (K)	Peraturan Walikota Madiun Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat proses pengambilan keputusan	Menjaga kerahasiaan data pemerintahan
8	Laporan Keuangan (Unaudited)	Pasal 17 H angka 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Bagian Pemerintahan Setda Kota Madiun	Sampai proses audit selesai	Informasi belum terjamin kebenarannya	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak bisa diekspos

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
selaku
ATASAN PPID PEMBANTU

TEGUH SUDARIYANTO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19800626 199912 1 001